



**PUSAT PENELITIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Focus Group Discussion Bidang Politik Dalam Negeri

“Natuna dan Konflik Laut Cina Selatan”

Jakarta, 29 Januari 2020

Diskusi internal bidang PDN berjudul “Natuna dan Konflik Laut Cina Selatan” mengundang dua pembicara untuk mengulas mengenai keamanan maritim di wilayah ZEE Indonesia, pasca terjadinya beberapa insiden pelanggaran perbatasan oleh RRC. Pembicara pertama, **Brigjen TNI Dr.rer.pol. Rodon Pedrason** menyampaikan ulasan yang berjudul “Masalah Laut Natuna Utara”. Sedangkan pembicara kedua, **Beni Sukadis**, memaparkan kajiannya mengenai “Natuna, ZEE dan Evaluasi Kebijakan Pertahanan”

Klaim RRC atas sebagian besar wilayah LCS dengan ‘Sembilan Garis Putus’ memang mengundang reaksi keras negara-negara di kawasan. Dalam konteks itu, sesungguhnya tumpang tindih klaim pada wilayah LCS merupakan problem kompleks sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat bereskalasi jadi konflik bersenjata terbatas (low intensity conflict).

Sejauh ini, respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika di Laut Cina Selatan lebih bersifat antisipatif. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia untuk mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, mendorong terbentuknya code of conduct di kawasan, membangun pangkalan terintegrasi militer (kogabwilhan I), dan upaya-upaya diplomasi lainnya baik secara bilateral maupun di kawasan (ASEAN).

Dalam menghadapi dinamika keamanan dan persepsi ancaman yang cukup tinggi, ditambah kegigihan RRC dalam menyatakan klaim *nine-dash line*, Indonesia perlu meningkatkan upayanya. Setidaknya terdapat beberapa opsi yang dilakukan oleh Indonesia:

- a. Tetap konsisten pada konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) dan tidak mengakui klaim *nine-dash line* RRC
- b. Meningkatkan diplomasi pertahanan dan membangun upaya kolektif di kawasan, termasuk membangun diplomasi media
- c. Meningkatkan *effective occupation*, belajar dari kejadian Sipadan-Ligitan, bukti kehadiran negara di wilayah yang diklaim (memanfaatkan hak berdaulat di ZEE).
- d. Belajar dari sikap Vietnam dalam '*drilling in contested water*'
- e. Terkait potensi konflik dengan China *Coast Guard* ke depan, kapabilitas TNI AL atau otoritas yang berwenang lainnya memang perlu ditingkatkan dalam menghadapi upaya pencurian ikan (*illegal fishing*)
- f. Peningkatan kemampuan radar (ISR) dan penggunaan pengawasan nirawak (UAV) perlu dilakukan untuk mengawasi wilayah kedaulatan dan penegakan hukum di ZEE yang sangat luas

Foto Kegiatan

